

STRATEGI PEMBERDAYAAN WANITA TANI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

STRATEGY TO EMPOWER WOMEN FARMERS AS AN EFFORT IMPROVING FAMILY WELFARE

Falaq Fazaruddin^{1*}, Mangku Purnomo², Asihing Kusnanti²

^{1,2}Program Studi Sosiologi Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

*Email Penulis korespondensi: falaqfazarudhin26@gmail.com

Abstrak

Indonesia tergolong Negara agraris dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Penduduk yang berada di pedesaan umumnya melakukan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian. Potensi sumber daya manusia di sektor pertanian tidak hanya mencakup laki-laki sebagai kepala rumah tangga, tetapi juga perempuan yang ikut serta bertani untuk menopang kehidupan keluarga. Kecamatan Duduksampeyan sebagai lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Gresik merupakan sentra penghasil tanaman pangan padi dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terbesar yaitu 2001 orang. Oleh sebab itu diperlukannya pemberdayaan wanita di sektor pertanian, harapannya agar pemberdayaan wanita di pedesaan mendapat posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menemukan strategi peningkatan pemberdayaan wanita tani dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga. Penelitian ini menggunakan *mix-method* yaitu gabungan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Data primer dikumpulkan dari kepala dinas sosial, coordinator PKH kabupaten, coordinator PKH kecamatan, Lazismu, dan ketua kelompok PKH Duduksampeyan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa PKH merupakan program lintas sektoral sehingga dalam melaksanakan PKH, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH seperti pendamping PKH, peserta PKH/penerima manfaat, Dinas Sosial Kabupaten Gresik mengembangkan hubungan kerjasama yang baik. Dengan adanya bantuan PKH kepada wanita tani di kecamatan Duduksampeyan maka dapat meningkatkan pendapatan keluarga dari Rp. 500.000 menjadi Rp. 900.000 atau meningkat 80%. Faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan wanita tani dapat meningkatkan kemandiri wanita tani di kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, sehingga tidak selamanya bergantung pada bantuan PKH, karena dapat melakukan usaha sendiri sebagai bagian dari ikhtiar pengentasan kemiskinan dan dapat berubah menjadi keluarga sejahtera mandiri. Dan selanjutnya pemberdayaan wanita tani di Kecamatan Duduksampeyan yaitu melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk peningkatan *soft skill*. Kemudian adanya kerjasama melalui PKH dengan Lazismu Gresik berupa penyuluhan dan sosialisasi serta memberikan bantuan berupa container.

Kata kunci: wanita tani, kemandirian, pendapatan, pemberdayaan

Abstract

Indonesia is classified as an agricultural country with a fairly high population growth rate. Residents in rural areas generally carry out economic activities in the agricultural sector. Human resource potential in the agricultural sector does not only include men as heads of households, but also women who participate in farming to support family life. Duduksampeyan District, as a research location, is located in Gresik Regency, which is the center for producing rice crops and the largest recipient of the Family Hope Program (PKH), namely 2001 people. Therefore, it is necessary to empower women in the agricultural sector, the hope is that empowered women in rural areas will get positions commensurate with their abilities. The aim of this research is to identify and find strategies to increase the empowerment of women farmers in an effort to increase family income. This research uses a mix-method, namely a combination of qualitative methods and quantitative methods. Primary data was collected from the head of social services, the district PKH coordinator, the sub-district PKH coordinator, Lazismu, and the chairman of the PKH group, Duduksampeyan. This research resulted in the finding that PKH is a cross-sectoral program so that in implementing PKH, the parties involved in implementing PKH such as PKH facilitators, PKH participants/beneficiaries, the Gresik Regency Social Service develop good cooperative relationships. With PKH assistance to women farmers in the Duduksampeyan District, family income can be increased from IDR. 500,000 to Rp. 900,000 or an increase of 80%. Inhibiting and supporting factors in empowering women farmers can increase the independence of women farmers in the Duduksampeyan District, Gresik Regency, so that they do not always depend on PKH assistance, because they can run their own business as part of poverty alleviation efforts and can turn into independent prosperous families. And then

empowering women farmers in Duduksampeyan District, namely conducting training and outreach to improve soft skills. Then there was collaboration through PKH with Lazismu Gresik in the form of counseling and outreach as well as providing assistance in the form of containers.

Keywords: women farmers, independence, income, empowerment

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensi. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdimensi sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi. Bahwa inti dari 13 masalah kemiskinan terletak pada *deprivation trap* atau jebakan kekurangan. *Deprivation trap* terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin, yaitu: 1) kemiskinan itu sendiri, 2) kelemahan fisik, 3) keterasingan, 4) kerentanan, dan 5) ketidakberdayaan (Nawawi & Hadari, 2012). Ketimpangan gender yang menimpa kaum perempuan seringkali menyebabkan terbatasnya ruang gerak yang tersedia terutama di sektor publik. Akibatnya perempuan sangat sulit untuk berkembang. Salah satu penyebab utamanya adalah ideologi patriarki yang masih banyak dianut oleh kalangan masyarakat. Hal ini yang termanifestasi dalam bentuk ketidakadilan gender yaitu subordinasi, kekerasan, marginalisasi stereotype, dan beban kerja yang tak seimbang.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 bahwa Kabupaten Gresik tercatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 8 % dan penduduk miskin sebesar 12,42 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Gresik, presentase kemiskinan tersebut lebih tinggi dari rata-rata provinsi Jawa Timur sehingga diperlukan perhatian khusus. Angka kemiskinan lebih tinggi dari angka pengangguran di Kabupaten Gresik, yang artinya warga di kabupaten Gresik memiliki pekerjaan, namun berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan sebesar Rp 505.499.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kualitas hidup masyarakat, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat (Haris, 2020). Salah satu program nasional sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan pemberdayaan pada perempuan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. PKH merupakan program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga pra sejahtera dengan komponen pendidikan, esehatan, dan kesejahteraan social. Sasarannya adalah keluarga yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Iswanto, 2023).

Pemberdayaan dapat diartikan secara berbeda menurut pendekatan yang digunakan. Berdasarkan kelompok developmentalisme, pemberdayaan diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil dengan meningkatkan kesadaran politis masyarakat supaya mereka bisa memperoleh akses terhadap sumber daya serta mampos mengakses manfaat pembangunan (Musa, 2017). Sasaran dari pemberdayaan adalah mengubah masyarakat sebelumnya sebagai objek pembangunan menjadi pelaku pelaku atau subjek dari proses dan tahapan pelaksanaan pembangunan. Menurut Trisnoasih & Turtiantoro (2019) bahwa konsep pemberdayaan ada tiga yakni *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* (pembangunan yang digerakkan masyarakat). Sedangkan menurut

kelompok anti *developmentalisme* mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya pembebasan dari determinisme dan kekuasaan yang absolut, dengan mendasarkan pada aktualisasi dan koaktualisasi ekstensi manusia dan kemanusiaan, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam system politik ekonomi, social, dan budaya. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk pemberantasan kemiskinan. Dengan pemberdayaan perempuan akan ada peningkatan kemampuan perempuan untuk mencapai tujuan pembangunan termasuk untuk menekan angka kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dari buruh tani yang ada di wilayah Industri di Kabupaten Gresik diperlukan strategi yang tepat kepada wanita tani wanita tani sesuai dengan tipe sosial yang ada di Kabupaten Gresik.

Bantuan sosial yang diberikan melalui PKH kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tidak hanya berupa uang, namun berupa pemberdayaan dan pendampingan kepada KPM untuk pemenuhan kebutuhan akses pendidikan dan kesehatan. Jenis dan jumlah bantuan yang ditentukan oleh banyaknya kategori dalam KPM yang disandang oleh LPM, dan kewajiban peserta PKH untuk menjalankan dua komitmen penting di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Komitmen bidang kesehatan berlaku bagi ibu hamil dan balita yang harus memeriksakan kesehatannya secara rutin tiap bulan di fasilitas kesehatan terdekat (puskesmas, pustu, poskesdes, posyandu dan lain-lain). Sedangkan untuk peserta didik diwajibkan untuk memenuhi absensi minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulannya (Kementerian Sosial RI, 2016). Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dari buruh tani di wilayah Industri di Kabupaten Gresik diperlukan strategi yang tepat kepada wanita tani wanita tanisesuai faktor pendorong dan penghambat PKH di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Geresik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi penelitian secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut memiliki letak geografis pada pinggiran kota industri, dan terdapat keluarga petani yang menjadi penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2023.

Penentuan informan dalam penelitian ini, menggunakan metode *snowball sampling* dan metode *purposive sampling*. Dimana jumlah informan penelitian yaitu wanita tani Wanita tani penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Duduksampeyan, Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gresik, Dinas sosial Kabupaten Gresik, dan Pengurus / Pendamping Lazismu Gresik. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam (*depth interview*), observasi, FGD (*Focus Group Discussion*), dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam analisis ini yaitu teori ACTORS yang memiliki 6 indikator yakni *Athority, Competence & Confidence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PKH Kecamatan Duduksampeyan

Objek dari penelitian ini adalah penerima PKH di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Adapun karakteristik berdasarkan Tabel 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	N	%
Jenis Kelamin Berdasarkan Kepala Keluarga		
Perempuan	1909	95
Laki-laki	96	0,5
Umur		
12-25	15	7
26-45	925	46
46-65	801	39
>65	264	13
Profesi		
Belum/Tidak Bekerja	23	1
Buruh Harian Lepas	15	0,7
Buruh Tani/Perkebunan	373	18
Guru	13	0,6
Karyawan Swasta	13	0,6
Mengurus Rumah Tangga	956	47
Pedagang	17	0,8
Pekerjaan Lain	2	0,04
Pembantu Rumah Tangga	1	0,04
Petani	300	15
Wiraswasta	292	14

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis kelamin penerima (Program Keluarga Harapan) PKH untuk keluarga miskin di didominasi oleh jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 1909 atau 95%. Kemudian dilihat dari segi umur yaitu paling banyak di umur 26-45 yaitu 925 atau 46%. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tani miskin penerima PKH di Kecamatan Duduksampeyan berada pada usia produktif. Artinya, secara fisik wanita tani miskin penerima PKH di Kecamatan Duduksampeyan memiliki kemampuan fisik untuk dapat bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Menurut (Ridwan, et al., 2019), menjelaskan bahwa angkatan kerja digolongkan umur produktif berkisar antara 15- 64 tahun. Penduduk yang berumur 0 -14 tahun dan berumur lanjut (< 64 tahun) termasuk dalam kategori tidak produktif dan tidak layak untuk bekerja karena produktivitasnya sangat rendah. Selanjutnya pada profesi didominasi oleh penerima PKH yang memiliki profesi menjadi ibu rumah tangga yaitu 956 atau 47% dan buruh tani yaitu 373 orang atau 18%. Menurut Nainggolan (2019) bahwa PKH sengaja memilih kaum ibu atau wanita sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan program. Pilihan ini sangat rasional mengingat ibu adalah sosok yang dominan dalam manajemen rumah tangga, khususnya untuk urusan domestik. Didukung pernyataan oleh (Setiawati, 2020) bahwa pemberdayaan kaum perempuan di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan rumah tangga. Kaum perempuan memiliki andil dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang malah melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga.

Dekripsi proses kegiatan pemberdayaan perempuan yang pernah ada di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) memiliki suatu terobosan program pemberdayaan perempuan sejak tahun 2018. Sasaran pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Gresik dan LSM KPS2K adalah kelompok perempuan miskin dan Buruh tani di Kabupaten Gresik, serta penerima manfaat perlindungan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin. Kecamatan Duduksampeyan kabupaten Gresik merupakan salah satu lokasi dalam penelitian ini. Menurut Rahmawati (2017) bahwa Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian uang tunai kepada RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya". PKH difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai target peserta. Bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial sembako merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.

Berdasarkan data di lapang bahwa perempuan miskin di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik didominasi oleh ibu rumah tangga dan buruh tani yang mana mereka melakukan pekerjaan di sawah dari pagi sampai sore. Peran wanita tani dalam keluarga miskin penerima PKH selain menjadi ibu rumah tangga, diantaranya adalah membantu kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga membantu kepala keluarga dalam mengelola usaha tani milik sendiri yang berupa curahan tenaga kerja serta ada juga perempuan tani yang bekerja di sektor pertanian untuk menambah penghasilan. Berdasarkan informasi di lapang menurut Umi Zulistanti selaku Ketua Kelompok Anggur penerima PKH bahwa:

"saya memiliki 5 (lima) anak, pekerjaan suami seorang buruh tani, dan tidak ada kepastian pendapatan dalam setiap bulan. Saya mengandalkan upah suami saja tidak cukup, pernah melakukan berdagang, tetapi sering rugi, dengan adanya bantuan dari kementerian membantu saya untuk mengelola keuangan"

Salah satu wujud Kerjasama antara Kementerian sosial dan Dinas Sosial kabupaten Gresik dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kecamatan Duduksampeyan yaitu dengan memberikan bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Sarofah, seorang penerima PKH dari Desa Tambakrejo yang memiliki pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.

"Dengan adanya program bantuan dari pemerintah yang berupa PKH ini mas, Saya sangat bersyukur karena dapat sedikit membantu suami saya untuk mencari nafkah dengan membuka usaha kecil kecilan, meskipun penghasilannya tidak seberapa tapi setidaknya membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar kayak beras mas, beras mahal le mas".

Pernyataan dari nforman di atas, maka diperlukan perhatian yang serius dari aparat pemerintah dalam memberikan arahan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, terutama bagi perempuan yang mendapatkan bantuan dana Program Keluarga Harapan

(PKH) yang hanya menghabiskan dana tersebut untuk konsumsi tanpa mereka mengelola dana tersebut sebagai sumber pendapatan.

Stakeholder dalam penelitian ini yaitu Wanita tani penerima PKH yang tercantum di DPTKS Kecamatan Duduksampeyan Dinas, Sosial dan Ketua Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan analisa menggunakan ACTORS. Adapun metode ACTORS (Cook & Macaulay, 1997) yaitu:

- a. Memberikan kewenangan, pendamping dalam melakukan pertemuan kelompok memberikan motivasi dan memberikan kewenangan kepada KPM untuk menentukan tujuan dari proses yang diberikan.
- b. Memberikan kepercayaan, bahwasanya semua KPM bisa berdaya dan mandiri untuk keluar dari kemiskinan
- c. Memberikan motivasi, dengan cerita-cerita sukses dari orang yang memiliki nasib yang sama namun bisa bangkit sebagai keyakinan bahwasanya semua KPM memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berdaya
- d. Memberikan kesempatan, yang sama dengan memberikan fasilitas pelatihan dan merencanakan luaran dari pemberdayaan yang dilakukan
- e. Memberikan tanggungjawab, untuk menyelesaikan rencana yang telah disusun
- f. Pendamping memberikan dukungan, berupa materil dan moril untuk keberlangsungan proses pemberdayaan.

Menurut Fabiyi & Akande (2015) bahwa memberdayakan perempuan dalam berbagai cara akan berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan gizi mereka sendiri dan juga kesejahteraan keluarga mereka. Menurut (Dadi & Suryadi, 2020) bahwa Dinas sosial memiliki peran dalam pemberdayaan untuk menanggulangnya kemiskinan dan melindungi seluruh bangsa melalui segala kebijakan yang diambil, salah satunya melalui kebijakan PKH. Hal ini dilakukan agar warga tidak merasa kesepian sehingga bisa memilikinya kekuatan untuk menghadapi permasalahan sosial yang mereka hadapi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asadullah dan Kambhupati (2021) bahwa wanita tani yang berdaya membantu mengatasi berbagai tantangan untuk mencapai ketahanan gizi.

Namun, pekerjaan perempuan sebagai petani menjadi tanda tanya besar. Hal ini karena sebagian besar perempuan yang terlibat di sektor pertanian di Asia Selatan adalah tidak diakui dan dibayar rendah serta potensi dan kontribusi Perempuan dalam pertanian diremehkan dalam banyak hal. Wanita tani di Afrika Sub-Sahara seringkali mengalami berbagai jenis kendala kredit dan sumberdaya serta berkurangnya akses informasi dan penyuluhan. Sehingga dapat dikemukakan bahwa berdasarkan pendapat informan dan referensi tersebut, pihak Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah menjalankan program nya tentang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Program yang dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat miskin yaitu PKH, BPNT/BSP, maupun penerima BST, UEP, KUBE serta program penanganan fakir miskin lainnya. Namun, fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dimana proses pendataan yang dilakukan oleh BPS dengan jangka waktu 5 tahun sekali dan sementara proses verifikasi dan validasi belum dapat dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penetapan calon penerima bantuan sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia masih terdapat keluarga penerima manfaat yang tidak tepat sasaran.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Pengaruh Dalam Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan Perempuan Untuk Wanita Tani di Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik

Pemberdayaan perempuan untuk wanita tani wanita tani di Kecamatan Dudusampeyan melalui program PKH. Program ini dilatarbelakangi oleh permasalahan utama pembangunan yakni banyaknya jumlah penduduk miskin manusia dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. PKH merupakan bantuan sosial kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kualifikasi tertentu (RTM kronis, rawan guncangan) dengan memberlakukan syarat tertentu. Berdasarkan data dari Dinas Sosial bahwa faktor pendukung yaitu:

Adanya materi pemberdayaan kepada Penerima PKH

Bantuan sosial PKH merupakan bantuan sosial bersyarat, yang mana bagi peserta PKH diwajibkan untuk memenuhi komitmen sesuai dengan komponen bantuan yang mereka terima. Apabila peserta tidak memenuhi komitmen mereka, maka bantuan yang diberikan akan ditangguhkan atau bahkan sampai dicabut. Kewajiban tersebut tentu pada akhirnya akan menciptakan perubahan perilaku pada peserta PKH untuk mengutamakan pendidikan anak. Maka, salah satu pemberdayaan perempuan di Kecamatan Dudusampeyan adalah melakukan edukasi kepada peserta penerima PKH.

Kegiatan tersebut mengajarkan pada orang tua agar bersikap baik kepada anak, tidak letih memotivasi anak serta membimbing anak dengan sabar sehingga anak tidak sampai merasa tertekan dan tetap semangat untuk belajar. Dan Peserta sangat antusias sekali dalam mengikuti edukasi ini yang mana outputnya para peserta PKH sadar bahwa kebutuhan pendidikan untuk anak itu juga penting agar masa depan mereka bisa lebih baik. Sehingga tujuan pemerintah tercapai yaitu meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan untuk menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat SMA. Didukung oleh penelitian (Sujarwo et al., 2021), bahwa adanya *Family Development Session* yang telah dilaksanakan di Yogyakarta oleh peserta PKH memberikan manfaat kepada keluarga dan memberikan program kegiatan di bidang peningkatan pendidikan dan meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pendidikan.

Adanya Alat Pembantu Yang Berupa Buku Yang Berisi Materi Proses Family Development Session (FDS)

Berdasarkan data di lapang bahwa dalam melakukan kegiatan sosialisasi disediakan sarana dan prasarana mulai dari buku panduan, alat-alat kantor yang lengkap, komputer, printer di setiap kecamatan. Menurut Rasyad (2016), bahwa program FDS sangat diperlukan yang terdiri dari pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga lainnya (Bappenas, Kementerian Kesehatan, Bank Dunia, UNICEF, dan Australia Aid) terkait kemiskinan, sebab FDS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga miskin dalam mengelola kondisi keuangan keluarga, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan nafkah anak-anak mereka secara mandiri. Oleh karena itu, dengan adanya FDS dilakukan dengan proses pendampingan dalam pertemuan bulanan. Pendamping PKH tidak hanya berperan memantau keluarga miskin, namun juga menjadi fasilitator. Untuk meningkatkan kapasitas pendamping PKH sehingga mereka mampu menjadi fasilitator FDS untuk mempercepat pemenuhan capaian PKH.

Adanya Sinergi dengan Lembaga Filantropi dan Linieritas Program Pemerintah

Sinergi dan kerjasama penerima PKH di Kecamatan Dudusampeyan berasal dari Lembaga filantropi Lazismu berupa modal usaha rombongan, dan perangkat kelengkapan usaha untuk masyarakat. Namun ada beberapa masyarakat yang tidak memanfaatkan peluang tersebut untuk berdagang tetapi hasil pemberian rombongan dijual kembali atau

menyepelkan pemberian. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dengan lembaga filantropi agar dapat selaras dengan tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat. Menurut (Dewantoro, et al, 2023) bahwa Lembaga filantropi hanya memikirkan bantuan saja, tidak untuk program pengembangan dan pemberdayaan keberlanjutan sehingga belum memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat hal ini karena bantuan bersifat *charity*.

Adapun yang menjadi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Duduksampeyan berdasarkan data lapang yaitu: ***Sarana Yang Berhubungan Dengan Ketersediaan***

Akses jalan di kecamatan Duduksampeyan bagus dan bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 namun, para perempuan di kecamatan Duduksampeyan yang berprofesi sebagai buruh tani dan juga petani sering sekali mengalami kekurangan air dan pupuk. Para petani di Duduksampeyan sering mengeluh karena kurangnya air untuk tanaman padi dan juga kelangkaan pupuk. Menurut (Hatta, 2022) bahwa kurangnya efektif dalam penyaluran pupuk dan petani sering tidak sesuai dalam penebusan pupuk bersubsidi serta distribusi pupuk dari produsen ke distributor mengalami keterlambatan dan kendala seperti cuaca. Padahal, pupuk komponen utama yang digunakan oleh petani mulai dari tahap pembibitan sampai dengan proses pemeliharaan. Sehingga bantuan dari PKH tersebut dialihfungsikan untuk kegiatan tanaman padi. Sejalan dengan pernyataan (Fitriyana, et al, 2023) bahwa masyarakat bergantung pada dana PKH ini sebagai tumpuan perekonomian keluarganya dalam artian hampir semua keluarga kebutuhannya bisa ditutupi oleh dana PKH, sehingga mereka malas bekerja, padahal kenyataannya dana PKH sendiri tidak terlalu banyak. Sehingga hal inilah yang membuat manfaat dana PKH tidak begitu terasa.

Para Peserta Program PKH Tidak Memiliki Alat Komunikasi Seperti HP dan Akses Komunikasi Juga Kurang Lancar Kepada Pendamping PKH

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapang menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Duduksampeyan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Terlihat dari tahapan proses pelaksanaan dari program tersebut yang telah berjalan lancar. Sedangkan dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH ditemukan bahwa ada beberapa penerima PKH yang tidak memiliki alat komunikasi seperti HP sehingga pendamping PKH kesusahan dalam mengontrol. Oleh karena itu, persoalan komunikasi dalam proses pelaksanaan PKH sering menimbulkan persoalan di lapangandi lapangan. Adanya miskomunikasi membuat pendamping PKH kesulitan dalam menangani komplain yang dilayangkan oleh warga, seperti datanya terhapus dari DTKS. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Priambodo (2021) bahwa salah satu faktor implementasi kebijakan pemerintah yaitu adanya komunikasi antara penerima bantuan dan pendamping sehingga informasi yang disalurkan tersampaikan dengan baik. Penyampaian hasil diskusi antara pendamping dan ketua kelompok dapat menyampaikan hasil diskusi kepada anggota, sebab proses komunikasi dapat menunjang keberhasilan program.

Adanya Kecemburuan Sosial dari Masyarakat Yang Tidak Menerima Bantuan, Sehingga Masih Ada Bantuan Yang Tidak Tepat Sasaran

Berdasarkan data di lapang bahwa proses penyaluran bantuan PKH ini sendiri menuai beberapa kritikan dari masyarakat seperti terjadinya ketidakmerataan, masyarakat merasa bahwa terjadi kesalahan dalam pendataan. Karena terdapat keluarga yang tidak mendapatkan bantuan. Padahal layak untuk mendapatkan bantuan tersebut hanya karena penerima memiliki anggota keluarga yang bekerja di kepala desa. Maka dari itu masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki seorang kerabat yang bekerja di pemerintahan desa hanya pasrah dan berharap kedepannya mereka terdaftar dan

menerima bantuan langsung dari program pemerintah terutama di Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husain, et al., (2021), bahwa pemanfaatan dana bantuan masih belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan karena penggunaan dana bantuan PKH masih belum dimanfaatkan dengan baik serta pendamping PKH perlu meverivikasi kembali peserta yang layak untuk mendapatkan PKH.

Peserta PKH Sulit Datang Tepat Waktu Bahkan Banyak Yang Tidak Hadir, Karena Alasan Yang Beragam

Secara umum pelaksanaan PKH di Kecamatan Dudusampeyan relatif berjalan sesuai tujuan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kurang tepatan sasaran dalam kepesertaan dan penyaluran. Bantuan sosial yang dibagikan kepada keluarga kurang mampu sesuai kriteria, tetapi masih ada keluarga yang tidak memenuhi kriteria (mampu) masih menerima bantuan sosial. Sebaliknya ada keluarga yang tidak dan kurang mampu belum mendapatkan bantuan (*eklusif eror dan inklusif eror*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bangun, et al., (2019), bahwa pembangunan infrastruktur dapat memacu pembangunan, mendorong inklusif dan kelanjutan. Kemudian memastikan pola keberlanjutan konsumsi dan produksi. peningkatan kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif. pembangunan berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua orang dan membangun pembangunan yang efektif, akuntabel, sehingga perlu menekankan dan memperkuat cara mengelaborasi dan merevitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan.

Strategi Pemberdayaan Wanita Tani Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik

Pengasahan Soft Skill Kerjasama Antara Dinas Sosial (Dinsos) Dengan Dinas Perdagangan (Diskoperindag)

Dilakukan pelatihan dari dinas sosial Kabupaten Gresik. Wanita tani penerima manfaat program keluarga harapan memberikan fasilitas kepada anak-anak bisa mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Kemudian dilakukan pemberdayaan perempuan dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini perlu dilakukan mengingat banyaknya sumber daya manusia perempuan yang tidak bekerja untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga strategi dalam menumbuhkan dan mengembangkan UMKM melalui pembinaan dan pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sariningsih, et al., (2023) bahwa pekerja sosial di tingkat kabupaten memberikan kesempatan dalam pelatihan bisnis untuk meningkatkan kompetensi usahanya dan mampu membimbing KPM menuju tingkat yang lebih sejahtera dalam bisnis. Tentunya, memiliki tantangan tersendiri bagi wanita tani di Kecamatan Dudusampeyan untuk menciptakan kreativitas dalam usaha kecil agar dapat berkelanjutan. Menurut Tiwari & Malati, (2023) bahwa perempuan di India sebagai kontributor utama terhadap pembangunan dan pertumbuhan negara, maka yang difokuskan adalah peningkatan keterampilan melalui pelatihan.

Lembaga Filantropi Untuk Modal Hibah

Filantropi merupakan tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain (Solikhah et al., 2021). Bisnis proses dari sebuah lembaga filantropi adalah input, proses, dan output. Input berupa donasi dari para donatur. Prosesnya adalah implementasi program-program, outputnya adalah program yang telah dilaksanakan. Dana berasal dari penghimpunan yang dilakukan dengan berbagai teknik, seperti galang dana yang dilakukan di jalan atau di titik lampu lalu lintas, kotak donasi yang terdapat di

masjid-masjid, dan transfer melalui rekening yang sudah dicantumkan, lembaga juga bekerjasama dengan perusahaan (*partnership*).

Potensi filantropi sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber dukungan dana alternatif dalam pemberdayaan masyarakat. Rekomendasi lembaga filantropi yaitu baznas, lazisnu dan Fos. Menurut (Utami, et al., 2021) bahwa pemerintah memiliki Program Keluarga Harapan (PKH) di bawah Kementerian Sosial dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan. model penyaluran dana zakat adalah memanfaatkan integrasi database yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, Baznas Bersama LAZ, dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang mana Baznas dan LAZ menginput dan mengecek data mustahiq terintegrasi dengan PKH database penerima dana keuangan. LAZISMu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sedekah dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMu didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, yang disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai LAZNAS melalui SK Menteri Agama No. 730/14 Desember 2016.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas sektoral sehingga dalam melaksanakan PKH kegiatan, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH seperti pendamping PKH, peserta PKH/penerima manfaat, Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Para pelaksana PKH mengembangkan hubungan kerjasama bersinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dengan adanya PKH kepada wanita tani di kecamatan Dudusampayan maka dapat melaksanakan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan wanita tani adakah memberikan akses kepada perempuan di kecamatan Dudusampayan Kabupaten Gresik agar tidak bergantung pada bantuan PKH dan dapat melakukan usaha sendiri untuk mengentaskan kemiskinan dan dapat menjadi keluarga sejahtera yang mandiri. Dan selanjutnya Pemberdayaan wanita tani di kecamatan Dudusampayan yaitu melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk peningkatan *soft skill* melaluikerjasama antar Lembaga filantropi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, H., Siagian, M., & Humaizi. (2019). The Effectiveness of the Ministry of Social Family's Hope Program (Program Keluarga Harapan) in Increasing the Welfare of the District of Medan Johor. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(4):125-134.
- Cook, S., & Macaulay, S. (1997). *Perfect Empowerment*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dadi, M. Y., & Suryadi, K. (2020). Citizen Participation in The Field of Social Welfare Through PKH (Study of Community Empowerment by The Social Service of Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara Province). *Journal of International Conference Proceedings*, 3(1).
- Dewantoro, M. M., Salim, F., & Miranda, A. (2023). Strategi Pengentasan Kemiskinan DanPemberdayaan Ekonomi Dengan FilantropiIslam Menjadi Variabel Moderator TerhadapKesejahteraan Masyarakat (Studi KasusYayasan BSM

- Ummat). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan dan Sosial (EMBISS)*, 3(4):420-429.
- Fabiyi, E. F., & Akande, K. E. (2015). Economic Empowerment for Rural Women in Nigeria: Poverty Alleviation through Agriculture. *Journal of Agricultural Science*, 7(9).
- Fitriyana, A., Nurdiana, T., & Syafari, M. R. (2023). Implementation Of The Hope Family Program For Poor Families In Batulicin Sub-District, Batulicin Sub-District, Tanah Bumbu District. *International Journal of Political, Law, and Social Science*, 4(3).
- Haris, M. (2020). Problematika Pemberdayaan Masyarakat Miskin. . *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*.
- Hatta, M. (2022). Strategy to Increase the Effectiveness of Subsidized Fertilizer Distribution: A Case Study in Indramayu Regency, West Java. . *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* .
- Husain, E., Mohi, M. K., & Radjak, L. I. (2021). The Effectiveness of the Family of Hope Program (PKH) in Lamu Village, BatudaaPantai District, Gorontalo District. *Journal of Management and Administration Provision*, 1(1):24-31.
- Iswanto, D. (2023). The Role of Social Workers in Empowering Poor Village Communities(Study of Indonesian Conditional Cash Transfer Programme (PKH)Facilitators in Jegulo Village, Tuban Regency). *Jurnal Adminitrasi Karya Dharma*, 2(2).
- Musa, M. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Mawaizh : Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(1), 107-125.
- Nainggolan, T. (2019). Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial. *Aspek Gender Dalam Program Keluarga Harapan*, 5(1).
- Nawawi, H., & Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rasyad, A. (2016). Participative Evaluation and the Quality of Community Empowerment Training of Program Keluarga Harapan (PKH) Companions. *International Journal of Education & Literacy Studies: Australian International Academic Centre, Australia*, 4(2).
- Ridwan, A., Lestari, R. D., & Fanani, A. (2019). 2019. Contribution Of Labor And Women Farmers Income In Poor Farmers Household Recipients Pkh (Program Keluarga Harapan) At Kedungadem Sub-District Bojonegoro Regency. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 3(1).
- Sariningsih, Y., Albert, W. K., & Mariane, I. (2023). Strategy To Improve Kpm's Start-Up Business Creativity in The Context Of Social Entrepreneurship Program. *International journal of professional business review*.
- Setiawati. (2020). Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Pengelolaan Usaha Rumahan di Tangerang Selatan. . *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, , 2(3):12-40.
- Sujarwo, Kusumawardani, E., Presetyo, I., & Dewi, A. A. (2021). Study on Needs Analysis of Family Multiliteracy Competence from Program Keluarga Harapan. Study on Needs Analysis of Family Multiliteracy Competence from Program Keluarga Harapan. *Knowledge E*.
- Tiwari, P, P., & Malati, N. (2023). Role of Training in Women Empowerment: An Empirical Analysis.. 15(1). *Journal of Technical Education and Training. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Publisher's Office*, 15(1).

- Trisnoasih, T. M., & Turtiantoro. (2019). Pemberdayaan Masyarakat: Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai Motor Penggerak Pariwisata di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Guci Kabupaten Tegal. *Journal of Politic and Government Studies*, 8 (2):181-190.
- Utami, C. B., Mubarak, A. F., & Hazmi, F. (2021). Integration of Zakah Information System, Family Hope Program (PKH) and Financial Information System (SLIK) for the Effectiveness of Zakat Distribution: A Business Model Canvas. *6th Indonesian Conference of Zakat*.